

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan suatu daerah pada dasarnya merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan suatu daerah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah secara proporsional. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, tentu saja daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh

karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber paling penting dalam urusan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) juga mencerminkan kemandirian daerah tersebut. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, pemerintah menyadari sektor pariwisata bukanlah penyumbang terbesar pendapatan daerah, namun sektor pariwisata juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Banyaknya potensi alam dan seni budaya di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

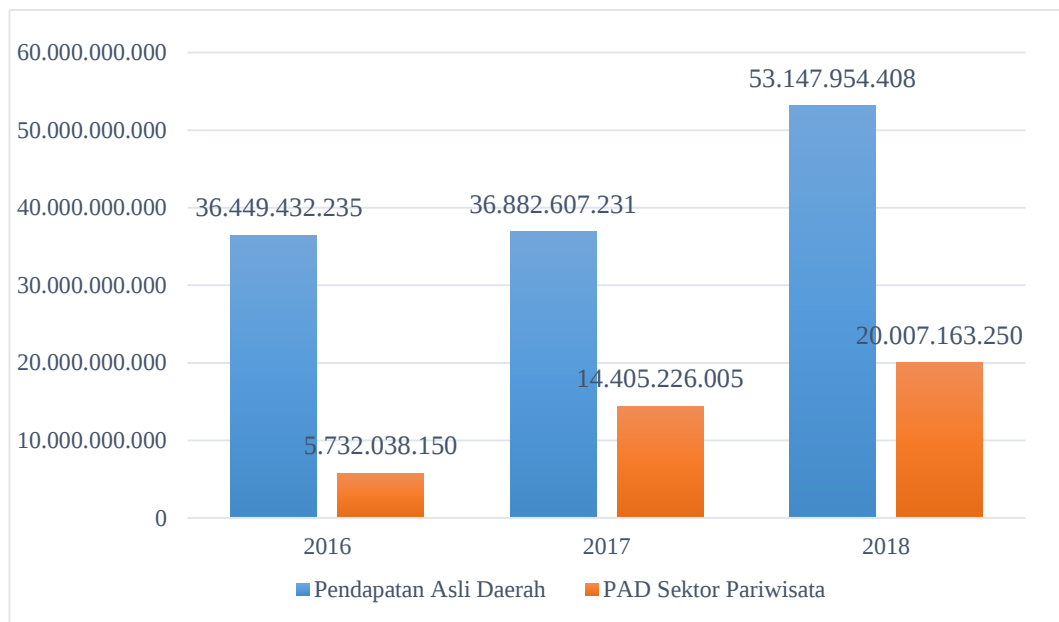
Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sebagai sumber pendapatan daerah sektor pariwisata tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tersebut.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin

pada tanggal 17 November tahun 2012. Letak geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada $108^{\circ}30'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai dengan $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Dilihat dari peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Berdasarkan perhitungan garis lurus jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Jawa Barat Kota Bandung adalah 211 kilometer. Kota terdekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah Kota Banjar dengan jarak 84 kilometer. Sedangkan jarak dengan kota paling utara adalah Kota Cirebon sejauh 193 kilometer luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha. Terbagi dalam sepuluh kecamatan, dan pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran berada di Kecamatan Parigi.

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi yang besar di sektor Pariwisata, baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam (Cagar Alam Pananjung), Pantai Batu hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, dan wisata sungai yaitu Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, Santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya.

Dari sekian banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, sektor pariwisatanya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk selanjutnya dapat menjadi sektor penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran.



Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2016-2018 (Rupiah)

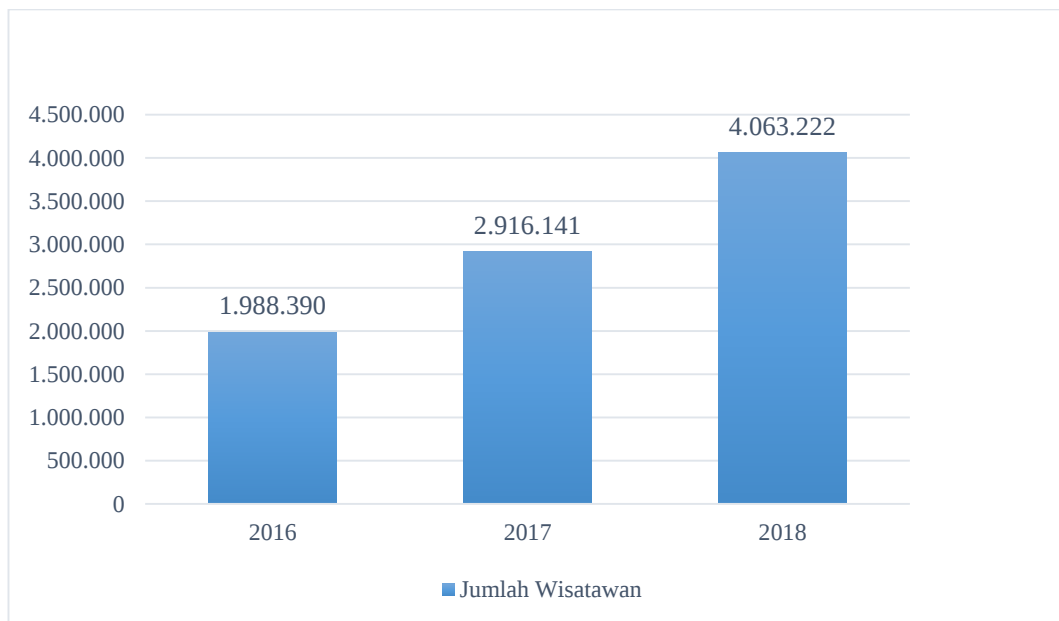
Sumber: Rekapitulasi Pendapatan Berdasarkan STS, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 sebesar 36.449.432.235 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan sebesar 36.882.607.231 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan yang sangat besar menjadi 53.147.954.408.

Pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada tahun 2016 sebesar 5.732.038.150 juta rupiah, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar

14.405.226.005 dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan lagi sebesar 20.007.163.250 juta rupiah.

Dengan terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata hal tersebut tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Tidak mengherankan apabila jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dikarenakan sebagian besar merupakan daerah pesisir pantai dan merupakan kawasan wisata favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.



Gambar 1.2 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2018 (Juta Jiwa)

Sumber: Laporan Perbandingan Kunjungan Wisata Tahunan, Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Gambar 1.2 Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran sebanyak 1.988.390 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan yang sangat drastis, pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 2.916.390 juta jiwa dan pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 4.083.222 juta jiwa..

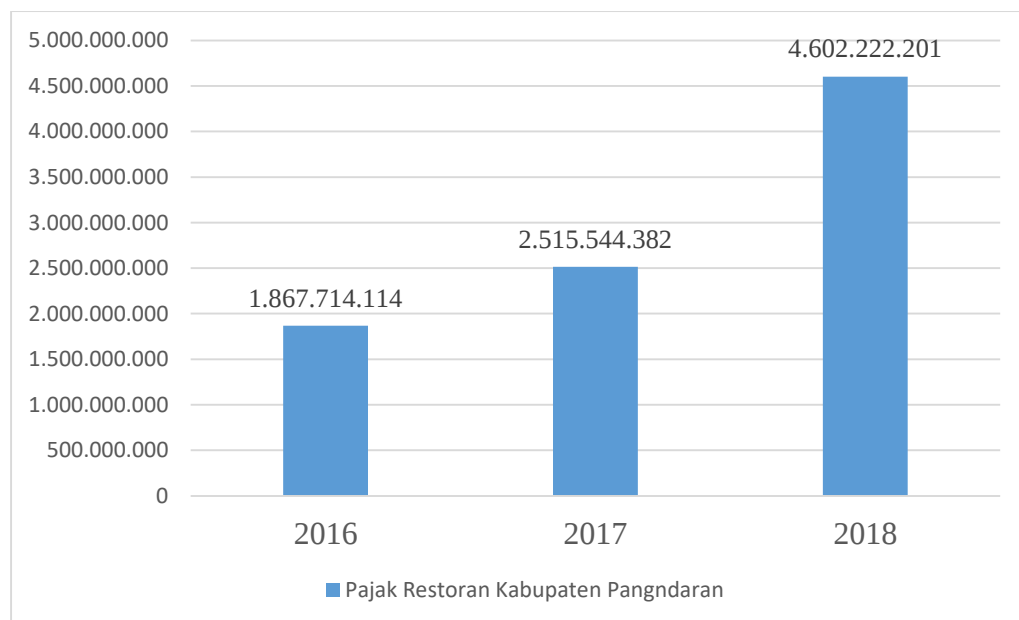


Gambar 1.3 Pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2018 (Rupiah)

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan Berdasarkan STS, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016-2018. Pajak hotel yang diterima pemerintah

Kabupaten Pangandaran selalu meningkat setiap tahunnya, penerimaan pajak hotel yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 5.950.901.837, peningkatan pajak hotel yang sangat signifikan terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018. Jumlah pendapatan pajak hotel yang diterima pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 sebesar 7.784.340.299 dan meningkat drastis pada tahun 2018 sebesar 11.790.134.922 .



Gambar 1.4 Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2018 (Rupiah)

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan Berdasarkan STS, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Dari data gambar 1.4 pendapatan pajak restoran yang diterima pemerintah Kabupaten Pangandaran selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran yang diterima Kabupaten Pangandaran sebesar 1.867.714.114 Miliar Rupiah, pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan yang sangat

signifikan sebesar 2.515.544.382 Miliar Rupiah, dan pada tahun 2018 pajak restoran yang diterima pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 4.602.222.201 Miliar Rupiah.



Gambar 1.5 Pajak Parkir Kabupaten Pangandaran periode 2016-2018 (Rupiah)

Sumber: Rekapitulasi Pendapatan Berdasarkan STS, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Dari gambar 1.5 penerimaan pajak parkir Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan signifikan mulai dari tahun 2016 sebesar 20.789.475, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu pada tahun 2018 sebesar 17.673.000 dan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 16.142.000.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya. Dalam pengelolaan daerah memerlukan

informasi tentang potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki, untuk itu perlu diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi

Penyumbang PAD Kabupaten Pangandaran terbesar berasal dari sektor pariwisata, untuk itu perlu diketahui variabel-variabel dari sektor pariwisata yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak dari sektor pariwisata ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada halaman sebelumnya maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada halaman sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui apakah Jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teoritis maupun empiris mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengambilan keputusan, dan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran serta meningkatkan kinerja Pemerintah daerah.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan sebagai referensi bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Selain itu juga sebagai bahan terperinci atau tambahan informasi sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah

dalam penelitian lebih lanjut lagi yang lebih mendalam dan dijadikan bahan perbandingan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangandaran melalui pengambilan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Dengan alasan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran dan Dinas Pariwisata memiliki data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis laksanakan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 diawali dengan pengajuan judul, pengambilan data, seminar usulan penelitian, penelitian lapangan, dan sidang skripsi.

Tabel 1.2 Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

[illegible]